



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

PENYUSUNAN RISK REGISTER PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email dp3appkb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

Palangka Raya, Februari 2025

Yth. Kepada
Inspektur Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

di-
PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR

Nomor: *000.f.f. 41 59* /Sekre/DP3APPKB

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Update penyusunan <i>Risk Register</i> Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk diketahui.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

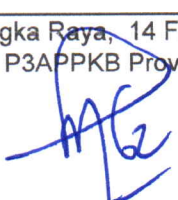
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2b

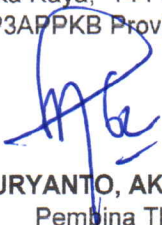
Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2021 -2026		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahu 2021-2026		
Tujuan Strategis	Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APKB Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif 3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak 4. Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah 5. Meningkatkan kualitas keluarga 6. Meningkatnya akseptor KB 7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
IKU Renstra OPD		IKU	2025
	1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Penilaian Resiko Strategi OPD Dilakukan Berdasarkan Atas Tujuan Strategis Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Sasaran Strategis : Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif IKU Strategis : Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)		
Palangka Raya, 14 Februari 2025 Kepala Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah  dr. UNAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes Pembina Utama Muda NIP.19680717 199903 2 006			

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: 2025		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		
Sasaran Strategis	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)	Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang
Informasi Lain			
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
		Palangka Raya, 14 Februari 2025 Sekretaris Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah  SURYANTO, AKS.,M.Si Pembina Tk I NIP.19730108 199403 1 006	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD BIDANG SEKRETARIAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode yang dinilai	: 2025			
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah			
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025			
Tujuan Strategis	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah			
Sasaran Strategis	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
			Palangka Raya, 14 Februari 2025 Sekretaris Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah  SURYANTO, AKS.,M.Si Pembina Tk I NIP.19730108 199403 1 006	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode yang dinilai	: 2025			
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah			
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024			
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan			
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan/Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
			Jumlah Focal Point OPD Yang terlatih	25 OPD
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi			
		Palangka Raya, 14 Februari 2025 Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan		
		 MARIANA, SE Pembina Tk I NIP.19670308 199403 2 011		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode yang dinilai	: 2025			
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah			
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025			
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025
	1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	30 Orang
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Indikator: Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi			
		Palangka Raya, 14 Februari 2025 Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan  MARIANA, SE Pembina Tk I NIP.19670308 199403 2 011		

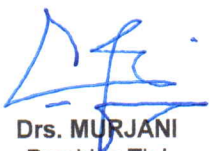
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG DATA DAN INFORMASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: 2025		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB		
Sasaran Strategis	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator
	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia
Informasi Lain	Target 2025 1 Dokumen		
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Indikator : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		
		Palangka Raya, 14 Februari 2025 Kepala Bidang Data dan Informasi  Drs. MURJANI Pembina Tk I NIP.19670210 199711 1 000	

PENETAPAN KONTEKS FRAUD OPERASIONAL BIDANG DATA DAN INFORMASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode yang dinilai	: 2025			
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah			
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025			
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APKB			
Sasaran Strategis	Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025
	1	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Indikator : Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi			
		Palangka Raya, 14 Februari 2025 Kepala Bidang Data dan Informasi  Drs. MURJANI Pembina Tk I NIP.19670210 199711 1 000		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode yang dinilai	: 2025			
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	: Berencana Provinsi Kalimantan Tengah			
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025			
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak			
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)/Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2025
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kegiatan: Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
			Palangka Raya, 14 Februari 2025 Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak  SYLVANA ANETHE, ST., MT Pembina NIP.19731005 199603 2 003	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD (BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode yang dinilai	: 2025			
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah			
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025			
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak			
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2025
	1	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan lintas Daerah kab/kota	Jumlah kegiatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan lintas Daerah kab/kota	2 Kegiatan
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kegiatan: Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Indikator: Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
		Palangka Raya, 14 Februari 2025 Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak  SYLVANA ANETTE, ST., MT Pembina NIP.19731005 199603 2 003		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	2025			
Periode yang dinilai	2025			
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	Provinsi Kalimantan Tengah			
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025			
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan			
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Perlindungan Perempuan/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			
		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2025
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)	1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 Orang
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Perlindungan Perempuan Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi Indikator : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik			
			Palangka Raya, 14 Februari 2025 Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga  MARIANA, SE Pembina Tk I NIP.19670308 199403 2 011	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

Nama Pemda	:	Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	:	2025		
Periode yang dinilai	:	2025		
Urusan Pemerintahan	:	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	:	Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024			
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan			
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Perlindungan Perempuan/Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			
		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2025
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)	1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 Orang
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Perlindungan Perempuan Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Indikator : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik			
		Palangka Raya, 14 Februari 2025 Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga  MARIANA, SE Pembina Tk I NIP.19670308 199403 2 011		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021 -2026			
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah			
Sumber Data	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahu 2021-2026			
Tujuan Strategis	Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APKB Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah			
Sasaran Strategis (tebalkan yang dipilih)	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif 3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak 4. Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah 5. Meningkatkan kualitas keluarga 6. Meningkatnya akseptor KB 7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pengendalian Penduduk (PP) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2025
	1	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1
	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1
	4	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal (BOKB)	Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga	1
	5	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	1

Informasi Lain	
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Design Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Advokasi dan Sosialisasi GDPK Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK Indikator : Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitasi, Pembimbingan , Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK

Palangka Raya, 04 Januari 2024
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana



YUYUN WAHYUDI, SE.,M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19771018 200501 1 005

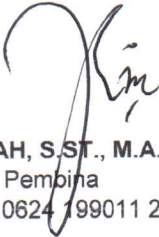
PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: 2025		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera		
Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas keluarga		
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)/Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)	Sub Kegiatan	Indikator	Target 2024
	1 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK		
		Palangka Raya, 13 Februari 2025 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  YUYUN WAHYUDI, SE.,M.Si Pembina Tk I NIP. 19771018 200501 1 005	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2c

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode yang dinilai	: 2025			
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah			
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025			
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan			
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Perlindungan Perempuan/Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2025
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	1 Dokumen
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 Layanan
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Perlindungan Perempuan Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Indikator : 1. Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan. 2. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
		Palangka Raya, 14 Februari 2025 Kepala UPT-PPA  JUMRAH, S.ST., M.A.P Pembina NIP. 19710624 199011 2 002		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO FRAUD UPT-PPA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 2d

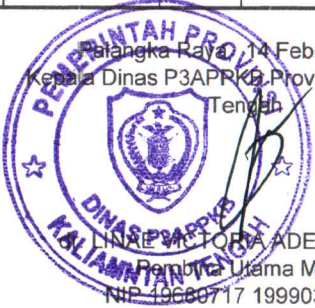
Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode yang dinilai	: 2025			
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Sumber Data	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025			
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan			
Sasaran strategis (tebalkan yang dipilih)	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Perlindungan Khusus Anak /Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun 2025
	1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30 Orang
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi Indikator : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi			
		Palangka Raya, 14 Februari 2025 Kepala UPT-PPA  JUMRAH, S.ST., M.A.P Pembina NIP. 19710624 199011 2 002		

KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3b

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Tengah									
Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah									
Tahun Penilaian	2025									
Periode yang dinilai	2025									
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan									
Urutan Pemerintahan	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
OPD yang Dinilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan/Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	RSO.25.08.20.01	Kepala Dinas	1. Ketidak pahaman atas jenis-jenis tindak kekerasan terhadap perempuan 2. Budaya masyarakat yang masih malu melaporkan masalah di keluarga	eksternal	C	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal	1. Masyarakat 2. Perempuan 3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng
			Keterlambatan penanganan tindak lanjut pelaporan kasus kekerasan	RSO.25.08.20.02	Kepala Dinas	1. keterbatasan jumlah psikolog klinis 2. kurang nya sarana dalam penjangkuan kasus yang dilaporkan	1. eksternal 2. internal 3. internal dan eksternal	C	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal	1. Masyarakat 2. Perempuan 3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng

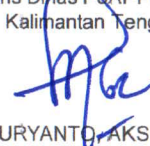
Palangka Raya, 14 Februari 2025
Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Penyelia Utama Muda
NIP. 19660717 199903 2 006

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah									
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah									
Tahun Penilaian	: 2025									
Periode yang dinilai	: 2025									
Tujuan Strategis	: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									
Sasaran strategis OPD	: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									
Urutan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah									

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan diklat yang dibutuhkan ASN tidak tersedia	ROO.25.08.20.06.01	Sekretaris	Belum terakomodirnya pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan melalui Perangkat Daerah	Internal	C	Tidak berkembangnya kapasitas ASN	1. ASN 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng
			Kuota kelas pelatihan terbatas	ROO.25.08.20.06.02		Anggaran terbatas dari pihak penyelenggara	Eksternal	UC		

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Sekretaris Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah


SURYANTO, AKS., M.Si
Pembina Tk I
NIP.19730108 199403 1 005

Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG SEKRETARIAT

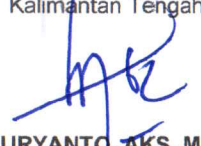
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah									
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah									
Tahun Penilaian	: 2025									
Periode yang dinilai	: 2025									
Tujuan Strategis	: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									
Sasaran strategis OPD	: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah									

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penggunaan uang persediaan untuk keperluan pribadi/pihak tertentu	RFO.25.08.20.06.01	Sekretaris	Ketidakpatuhan dalam aturan penggunaan UP untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran SKPD	Internal	C	Keterlambatan Pertanggungjawaban keuangan sehingga GU tertunda menyesuaikan 50% penyerapan UP	ASN/Bidang/Dinas	

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Sekretaris Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah


SURYANTO, AKS., M.Si
Pembina Tk I
NIP.19730108 199403 1 006

Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi	Pengajuan anggaran Responsif Gender tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.08.20.01.01	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	Kurangnya tenaga terlatih (Focal point) untuk menyusun analasi Gender di Tiap OPD	Eksternal	C	Belum terpenuhinya penganggaran yang Responsif Gender di tiap OPD sehingga hasil pembangunan tidak responsif .	1. Masyarakat : Perempuan dan laki-laki , anak-anak laki-laki dan Perempuan , Lansia Laki-laki dan Perempuan , Disabilitas Perempuan dan Laki-laki 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota	
			Program dan kegiatan di Tiap OPD belum responsif gender	ROO.25.08.20.01.02		Kurangnya pemahaman akan pentingnya Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Eksternal	C	Masing-masing SOPD masih Kesulitan dalam menentukan program dan kegiatan yang Responsif Gender		

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Kepala Bidang Kualitas Hidup PerempuanMARIANA, SE
Pembina Tk I
NIP.19670308 199403 2 011

Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan
Urutan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/ Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Peserta kegiatan Penerima Manfaat Bantuan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Perempuan yang mempunyai Industri Rumahang yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan	RFO.2.5.08.20.01.03	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	Pendataan Perempuan Industri Rumahang yang kurang update dan valid	Internal	C	Penerima manfaat sosialisasi tidak terdata dan pelaksanaan kegiatan tidak efektif	Perempuan Industri Rumahang	

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

MARTANA, SE
Pembina Tk I
NIP.19670308 199403 2 011

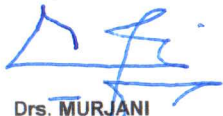
Formulir Kertas Kerja
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG DATA DAN INFORMASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah										
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah										
Tahun Penilaian	: 2025										
Periode yang dinilai	: 2025										
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB										
Sasaran strategis OPD	: Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah										
Urutan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah										

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Data Gender dan Anak pada Aplikasi SIGA tidak akuntabel	ROO.25.08.20.02.01	Kepala Bidang Data dan Informasi	Belum tersedianya operator penginputan SIGA di tingkat kabupaten/Kota	Eksternal	C	Kesulitan dalam menentukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan PPPA	1. Masyarakat 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng dan Kabupaten/Kota	
			Data Gender dan Anak tidak Handal	ROO.25.08.20.02.02		Kurangnya pemahaman akan pentingnya penginputan data gender dan anak	Eksternal	C	Kesulitan dalam menentukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan PPPA		

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Kepala Bidang Data dan Informasi


Drs. MURJANI
Pembina Tk I
NIP.19670210 199711 1 000

Formulir Kertas Kerja
IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG DATA DAN INFORMASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APKB
Sasaran strategis OPD	: Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah
Urutan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Penyalahgunaan wewenang dengan memanipulasi data dalam Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	RFO.25.08.20.04.03	Kepala Bidang Data dan informasi	Tindakan untuk memenuhi kondisi objek penilaian data agar sesuai dengan standar yang diinginkan/ditetapkan	Internal	C	Ketidakakuratan data yang dikumpulkan dan ketidaktepatan dalam analisis data untuk kebutuhan perencanaan program	Dinas	

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Kepala Bidang Data dan Informasi


Drs. MURJANI
Pembina Tk I
NIP.19670210 199711 1 000

Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak
Urutan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Adanya ego sektoral dan terkendalanya koordinasi dalam penilaian KLA	ROO.25.08.20.03.01	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK (PPH)	Pemahaman tentang indikator penilaian KLA tidak sama antar lembaga layanan anak	Internal	C	Kabupaten/Kota tidak layak Anak	1. Masyarakat, khususnya tentang hak-hak anak tidak terlayani oleh pemerintah di Kab/Kota 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng
			Jejaring antar lembaga layanan anak belum terkoordinasi dengan baik	ROO.25.08.20.03.02		Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pada lembaga layanan anak	Internal	C	Belum terpenuhi Hak Anak	1. Masyarakat, khususnya tentang hak-hak anak tidak terlayani oleh pemerintah di Kab/Kota

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak


SYLVANA NETHE, ST., MT
Pemda
NIP.19731005 199603 2 003

Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun Penilaian : 2025

Periode yang dinilai : 2025

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak

Sasaran strategis OPD : Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak

Urutan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan lintas Daerah kab/kota	Jumlah kegiatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan lintas Daerah kab/kota	Penyimpangan penentuan kriteria anak dari Forum Anak Daerah yang didelegasikan untuk mengikuti temu Forum Anak Daerah	RFO 25 08.20.03.03	Kepala Bidang Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak	Kesengajaan mengirimkan anak yang bukan merupakan anggota Forum Anak Daerah dari kab/kota dan provinsi karena alasan tertentu	Internal	C	Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang disampaikan pada Temu Forum Anak Daerah dari kab/kota dan provinsi tidak tepat sasaran	Forum Anak Daerah Kalteng

Palangka Raya, 14 Februari 2025

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak


SYLVANA ANETTE, ST., MT
Pembina
NIP.19731005 199603 2 003

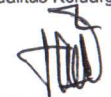
Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif
Urutan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Tidak ada situasi darurat (bencana alam, banjir, kebakaran, dan lain-lain)	ROO.25.08.20.04.01	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Situasi Bencana/situasi Khusus Tidak bisa diprediksi	Eksternal	UC	Kegiatan tidak dapat terlaksana	Perempuan dan anak
		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Keterbatasan jumlah paket bantuan yang disediakan/diberikan	ROO25.08.20.04.02		Menunggu Surat Edaran (SE) Pemda tentang kejadian/situasi Darurat	Internal	C	Terdapat perempuan dan anak yang tidak mendapatkan bantuan	Perempuan dan anak

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan
Kualitas Keluarga
MARIANA, SE
Pembina Tk I
NIP.19670308 199403 2 011

Formulir Kertas Kerja
IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun Penilaian : 2025

Periode yang dinilai : 2025

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis OPD : Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif

Urutan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)			
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena		
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l		
1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Penyimpangan penyaluran bantuan tanpa pertanggung jawaban data penerima bantuan yang berdampak dalam situasi darurat dan kondisi khusus	RFO 25.08.20.04.03	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Ketidakpatuhan administratif keuangan dan pelaporan dan ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan karena belum ada pelatihan khusus etika program bantuan sosial	Internal	C	Penerima bantuan tidak terdata dan tidak tepat sasaran	Perempuan dan anak		

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Plt. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga


MARIANA, SE
Pembina Tk I
NIP.19670308 199403 2 011

Formulir Kertas Kerja
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah									
Nama OPD		: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah									
Tahun Penilaian		: 2025									
Periode yang dinilai		: 2025									
Tujuan Strategis		: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera									
Sasaran strategis OPD		: Meningkatkan kualitas keluarga									
Urutan Pemerintahan		: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
OPD yang Dinilai		: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah									
No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
				Risiko							
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Peserta tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi 1000 HPK	ROO.25.14.20.05.01	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Perangkat daerah terkait kurang responsif dengan tidak hadir pada kegiatan	Internal	C	Informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada peserta dan masyarakat	1. Anak Balita dan Baduta 2. Masyarakat 3. Dinas P3APPKB Prov Kalteng dan Kabupaten/Kota	
			Masih ada Baduta dan Balita yang <i>stunting</i>	ROO.25.14.20.05.02		Tingkat pemahaman masing-masing peserta yang berbeda	Internal	C	Angka stunting masih tinggi		
2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Belum optimalnya penyusunan Dokumen GDPK sesuai standar panduan dokumen	ROO.25.14.20.05.03		Pemahaman yang belum maksimal mengenai pokok-pokok pembangunan kependudukan	Internal dan eksternal	C	Penyempurnaan dan pembaharuan dokumen GDPK secara berkala	1. Masyarakat 2. Dinas P3APPKB	
4	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	ROO.25.14.20.05.04		Perangkat daerah dan Pemerintah Kab/Kota terkait kurang responsif dengan tidak hadir pada kegiatan	Internal dan eksternal	C	Ketidaktercapaian tujuan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kab/Kota 3. TPPS Provinsi 4. TPPS Kab/Kota 5. Mitra Kerja	
5	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Belum terlaksananya kemitraan dengan lembaga terkait KKBPK	ROO.25.14.20.05.06		Minimnya pemahaman keluarga tentang program KKBPK	Eksternal	C	Belum terfasilitasinya mitra kerja dalam program KKBPK	1. Masyarakat 2. Dinas P3APPKB	
6	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar mitra dapat menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan program.	ROO.25.14.20.05.07		Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar mitra dapat menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan program	Internal	C	Angka stunting masih tinggi	1. Anak Balita dan Baduta 2. Masyarakat 3. Dinas P3APPKB Prov Kalteng dan Kabupaten/Kota 4. BKKBN	

Palangika Raya, 13 Februari 2025
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

YUYUN WAHYUDI, SE.,M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19771018 200501 1 005

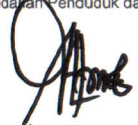
Formulir Kertas Kerja
IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian : 2024
Periode yang dinilai : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
Sasaran strategis OPD : Meningkatkan kualitas keluarga
Urutan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Pelaksanaan kegiatan untuk sosialisasi stunting yang tidak sesuai dengan jenis initervensi (kewenangan) dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024	RFC 2508.20.05.01	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketidakhahaman pelaksanaan kewenangan sesuai Pembagian Tugas yang ditetapkan dalam Pergub	Internal	C	Ketidaktercapaian tujuan Tim TPPS Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diampu oleh Dinas P3APKB Provinsi Kalteng	Masyarakat/Anak

Palangka Raya, 13 Februari 2025
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


YUYUN WAHYUDI, SE.,M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19771018 200501 1 005

Formulir Kertas Kerja
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL UPT-PPA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3c

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif
Urutan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi	ROO.25.08.20.07.01	Kepala UPT-PPA	Keterbatasan informasi terkait kewenangan kebijakan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan	Internal	C	Layanan penanganan korban kekerasan perempuan tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa terungkap secara maksimal	Masyarakat yang melaporkan	
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA	ROO.25.08.20.07.02	Kepala UPT-PPA	Tersedianya layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan	Eksternal	C	Kasus tidak bisa terungkap dengan maksimal	Masyarakat yang melaporkan	

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Kepala UPT-PPA


JUMRAH, S.ST., M.A.P
Pembina
NIP. 19710624 199011 2 002

Formulir Kertas Kerja

IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD UPT-PPA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Form 3d

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Perlindungan Korban Kekerasan pada Rumah Perlindungan yang ditentukan tidak sesuai SOP Layanan penampungan Sementara Korban Kekerasan	RFO.25.08.20.07.03	Kepala UPT PPA	Kelalaian dalam memantau kondisi korban kekerasan selama ditempatkan dalam Rumah Perlindungan	Internal	C	Terjadinya kekerasan ataupun penelantaran oleh petugas penjaga Rumah perlindungan	Korban kekerasan	

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Kepala UPT-PPA


JUMRAH, SST., M.A.P
Pemimpin
NIP. 19710624 199011 2 002

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis Pemda	: Meningkatkan Kesenjangan Gender
Tujuan Strategis OPD	: Tujuan 1 Meningkatkan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APKB Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
Tujuan Operasional OPD	:
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Dinas P3APKB:				
1	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	RSO.25.08.20.01	3	3	9
2	Keterlambatan penanganan tindak lanjut pelaporan kasus kekerasan	RSO.25.08.20.02	3	3	9
II	Risiko Operasional Sekretariat				
1	Kegiatan diklat yang dibutuhkan ASN tidak tersedia	ROO.25.08.20.06.01	3	3	9
2	Kuota kelas pelatihan terbatas	ROO.25.08.20.06.02	3	3	9
III	Risiko Operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan				
1	Pengajuan anggaran Responsif Gender tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.08.20.01.01	3	3	9
2	Program dan kegiatan di Tiap OPD belum responsif gender	ROO.25.08.20.01.02	3	3	9
IV	Risiko Operasional Bidang Data dan Informasi				
1	Data Gender dan Anak pada Aplikasi SIGA tidak akurat	ROO.25.08.20.02.01	3	3	9
2	Data Gender dan Anak tidak Handal	ROO.25.08.20.02.02	3	3	9
V	Risiko Operasional Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak				
1	Adanya ego sektoral dan terkendalanya koordinasi dalam penilaian KLA	ROO.25.08.20.03.01	3	3	9
2	Jejaring antar lembaga layanan anak belum terkoordinasi dengan baik	ROO.25.08.20.03.02	3	3	9
VI	Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera				
1	Tidak ada situasi darurat (bencana alam, banjir, kebakaran, dan lain-lain)	ROO.25.08.20.04.01	3	3	9
2	Keterbatasan jumlah paket bantuan yang disediakan/diberikan	ROO.25.08.20.04.02	3	3	9
3	Penyimpangan penyaluran bantuan tanpa pertanggung jawaban data penerima bantuan yang terdampak dalam situasi darurat dan kondisi khusus	RFO.25.08.20.04.03	2	5	10
VII	Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas				
1	Peserta tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi 1000 HPK	ROO.25.14.20.05.01	3	3	9
2	Masih ada Baduta dan Balita yang stunting	ROO.25.14.20.05.02	4	4	16
VIII	Risiko Operasional UPT PPA				
1	Masih terdapat pengaduan kekerasan perempuan yang bukan kewenangan Provinsi	ROO.25.08.20.07.01	3	3	9
2	Ancaman pelaku kekerasan terhadap korban /pelapor ke UPT PPA	ROO.25.08.20.07.02	2	3	6

Palangka Raya, 14 Februari 2025
Kepala Dinas P3APKB Provinsi
Kalimantan Tengah



dr. CINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19680717-199903 2 006

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah						
Tahun Penilaian : 2025						
Tujuan Strategis : Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah						
Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Dinas P3APPKB:					
1	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	RSO.25.08.20.01	9	Kepala Dinas	1. Ketidak pahaman atas jenis-jenis tindak kekerasan terhadap perempuan 2. Budaya masyarakat yang masih malu melaporkan masalah di keluarga 3. Kurangnya sosialisasi dimasyarakat tentang kekerasan	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal
II	Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera					
1	Penyimpangan penyaluran bantuan tanpa pertanggung jawaban data penerima bantuan yang berdampak dalam situasi darurat dan kondisi khusus	RFO.25.08.20.04.03	10	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Ketidakpatuhan administratif keuangan dan pelaporan dan ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan karena belum ada pelatihan khusus etika program bantuan sosial	Perempuan dan anak
III	Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas					
1	Masih ada Baduta dan Balita yang stunting	ROO.25.14.20.05.02	16	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Tingkat pemahaman masing-masing peserta yang berbeda	Angka stunting masih tinggi

Palang Jaya, 14 Februari 2025
Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



DINAS P3APPKB
KALIMANTAN TENGAH

Widyadiktor Aden, M.M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah : 2025					
Tujuan Strategis		Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah					
Urusan Pemerintahan		: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Dinas P3APPKB:						
1	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	RSO.25.08.20.01	Sosialisasi Pelayanan UPT PPA	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan Pemberian Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Layanan UPT PPA	Kepala Dinas	Januari-Desember
II	Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera						
1	Penyimpangan penyaluran bantuan tanpa pertanggung jawaban data penerima bantuan yang terdampak dalam situasi darurat dan kondisi khusus	RFO.25.08.20.03	Koordinasi dengan P/inak Kementerian	Kekurangan personil untuk pembagian bantuan kelapangan untuk pemberian spesifik kepada korban	Penambahan personil petugas pembagian dan perbaikan sistem data penerima bantuan	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Januari-Desember
III	Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas						
1	Masih ada Baduta dan Balita yang stunting	ROO.25.14.20.05.02	Sosialisasi 1000 HPK	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Rangkaian Pemberian edukasi pencegahan Perkawinan Usia Anak (PUA) untuk mendukung pencegahan stunting	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas	Januari-Desember

14 Februari 2025
Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



dr. LUKAS VICTORIA ADEN, M.M.Kes
DINAS P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
KALAMANTAN TEL 0830 717 19903 2 006

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
 Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak
 Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APKKB
 Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
 Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Peningkatan Pemberian Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Layanan UPT PPA	Sosialisasi, Penyebaran Leaflet, Pemasangan Spanduk, Baliho Videotron serta medsos Dinas P3APKKB	Kepala Dinas	Januari-Desember		
2	Penambahan personil petugas pembagian dan perbaikan sistem data penerima bantuan	pengajuan penambahan SDM dan pembuatan SOP penyaluran dan penerimaan bantuan	Kepala Dinas	Januari-Desember		
3	Rangkaian Pemberian edukasi pencegahan Perkawinan Usia Anak (PUA) untuk mendukung pencegahan stunting	Sosialisasi dan KIE terkait pencegahan stunting	Kepala Dinas	Januari-Desember		

Palangka Raya, 14 Februari 2025
 Kepala Dinas P3APKKB Provinsi Kalimantan Tengah



LUNAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19680717 199903 2 006

Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Signifikan	Sedang	Signifikan	signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	5	5	10	15	20	25
	Kemungkinan Besar	4	4	8	12	16	20
	Mungkin	3	3	6	9	16	15
	Jarang	2	2	4	6	8	10
	Sangat Jarang	1	1	2	3	4	5

Keterangan

	Level Risiko	Besaran Risiko	
Merah	Hampir Pasti	15-25	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko
Orange	Kemungkinan Besar	10-14	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Kuning	Mungkin	5-9	Diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada
Hijau	Jarang	3-4	Tidak diperlukan tindakan
Biru	Sangat Jarang	1-2	Tidak diperlukan tindakan



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Brigjen Katamso No. 11 Email :dp3appb@kalteng.go.id Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 100.3.31/22 /SEKRE/DP3APPKB

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
DI LINGKUNGAN DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPALA DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu upaya mengoptimalkan pengelolaan resiko pada tingkat Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Benar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembatasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Administrasi
6. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- : Membentuk Struktur Pengelola Resiko di Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan Tim dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Struktur Pengelola Risiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari :
- a. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku penanggung jawab pengelola risiko;
 - b. Sekretaris sebagai koordinator penyelenggara pengelolaan risiko;
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR) yaitu :
 - (1) Kepala Dinas sebagai Ketua;
 - (2) Sekretaris sebagai koordinator merangkap anggota;

- (3) Kepala Bidang sebagai anggota;
- (4) Seluruh kepala Sub Bagian/JFT Perencana Ahli Muda/ JFT Analis Kebijakan sebagai anggota.
- d. Sekretariat Manajemen Resiko, yang terdiri dari :
 - (1) Sekretariat sebagai koordinator merangkap anggota;
 - (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai anggota;
 - (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai anggota;
 - (4) JFT Perencana Ahli Muda/ JFT Analis Kebijakan sebagai anggota.
 - (5) Fungsional Umum sebagai anggota.
- e. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kepala Bidang Data dan Informasi, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Unit kepatuhan internal.

KETIGA

- : Struktur Pengelola Resiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal:
 - (1) Membantu Komite Eksekutif dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - (2) Membantu Komite Eksekutif dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko dan selera risiko;
 - (3) Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Sekretaris sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :
 - (1) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - (2) Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat-surat, undangan rapat dan notulen;
 - (3) Memfasilitasi proses penilaian risiko;
 - (4) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - (1) Menyusun dan menetapkan risiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
 - (2) Menyusun, menetapkan dan melaporkan level risiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah secara tahunan;

- (3) Menginformasikan dan melaporkan level risiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah serta pelaksanaan mitigasi risiko Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
 - (4) Memastikan proses manajemen risiko pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berjalan efektif.
- d. Sekretariat manajemen risiko memiliki tugas dan tanggungjawab mengadministrasikan hasil proses manajemen risiko di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :
- (1) Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan satgas SPIP Terintegrasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
 - (2) Mengkompilasi register risiko dari masing-masing eselon di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
 - (3) Menyelaraskan risiko antar masing-masing eselon di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
 - (4) Menyusun profil risiko menjadi dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ;
- e. Mengkoordinasikan penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi. Unit kepatuhan internal manajemen risiko memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- (1) Memantau penyusunan profil manajemen risiko dan rencana penanganan risiko;
 - (2) Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP/realisasi pelaksanaan RTP tiap semester dan tahunan;
 - (3) Memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh pemilik risiko;
 - (4) Memantau tindak lanjut revidi dan/atau audit manajemen risiko.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

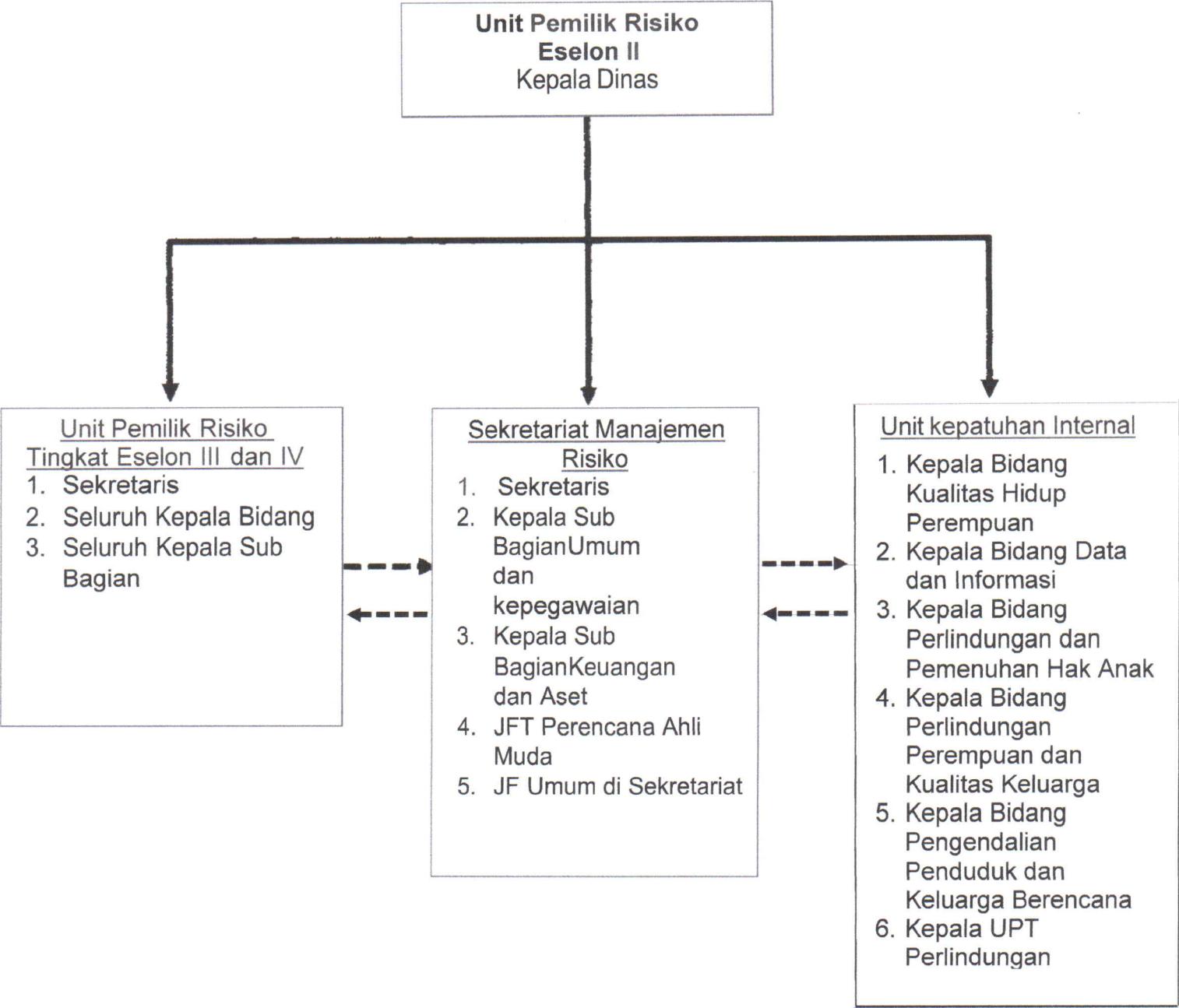
: Keputusan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
: 190.3.3 / 22 /SEKRE/DP3APPKB
: 02 Januari 2025
: Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	JABATAN DALAM DINAS		KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
A.	PENANGGUNG JAWAB RISIKO		
	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
	Sekretaris		
C.	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
	1.	Kepala Dinas	Ketua
	2.	Sekretaris	Koordinator
	3.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Anggota
	4.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
	5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Anggota
	6.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Anggota
	7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
D.	SEKRETARIAT MANAJEMEN/PENGELOLA RISIKO		
	1.	Kepala Dinas	Ketua
	2.	Sekretariat	Koordinator
	3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	4.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
	5.	JFT Perencana Ahli Muda	Anggota
	6.	JF Umum di Sekretariat	Anggota
E.	UNIT KEPATUHAN INTERNAL		
	1.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
	2.	Kepala Bidang Data dan Informasi	
	3.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
	4.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	
	5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	6.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 100.3.3 / 22 /SEKRE/DP3APPKB
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Struktur Pengelola Resikodi Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Keterangan

- 1. : Garis Komando
- 2. : Garis Koordinasi